

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang memiliki kewajiban sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran belanja SKPD diperuntukan untuk membiayai seluruh dana program kerja yang telah dirumuskan oleh SKPD dalam satu periode. Secara garis besar penggunaan anggaran belanja dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja anggaran bagi perangkat daerah yang akan berdampak pada bagaimana melaksanakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam perumusan anggaran belanja SKPD ini dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi para pegawai SKPD. Untuk Perumusan anggaran belanja dipengaruhi oleh hasil evaluasi periode sebelumnya, apakah dalam penyelenggaraan anggaran ini terdapat kekurangan apa tidak. Apabila terdapat kekurangan, maka akan di evaluasi untuk perbaikan melalui kebijakan yang dikeluarkan dalam hal perumusan anggaran periode berikutnya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kota/Kabupaten berperan sebagai koordinasi pembedayaan masyarakat,

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan yang di bawahnya terdapat kelurahan/desa. Kecamatan ini juga merupakan salah satu naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan perumusan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan atas keuangan di wilayah kecamatan itu sendiri. Dalam segi keuangan kecamatan, tugas camat adalah sebagai salah satu pengguna anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di kecamatan.

Pada usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, baik secara individu ataupun kelompok seluruh komponen kerja harus dijalankan secara seimbang agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran yang ada. Keberhasilan kerja pegawai secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari pegawai itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan, dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan organisasi atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap pegawai dituntut untuk dapat memaksimalkan segenap potensi yang ada pada diri pegawai.

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Kinerja pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, maka dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran belanja Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 persentasi penyerapan anggaran belanja kota Tasikmalaya sebesar 90,31%, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 berturut-turut mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 menjadi 84,70%, dan pada tahun 2015 turun menjadi 77,58%. Walaupun pada tahun 2016 ada kenaikan menjadi 79,38%, tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 79,21% z.

Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih serius dalam melakukan penyerapan anggaran. Pihaknya tidak menginginkan penyerapannya terhambat. “Harus cari akal. Bagaimana caranya semua harus tercapai. Intinya cara pengerjaannya harus dipercepat, tetapi jangan lupa kualitas harus diutamakan agar hasilnya bisa memuaskan sesuai dengan harapan.” ujar Budi, Senin (23/10/2017). Menurutnya, masih ada waktu dua bulan ke depan untuk menuntaskan semua program kerja yang telah dicanangkan. Hasil evaluasi gambaran umum realisasi keuangan dan capaian fisik pembangunan di Kota Tasikmalaya sampai hari ini mencapai 60,94 persen. (Sumber: Edy Mulyana. 2017. Realisasi Penyerapan Anggran Kota Tasik Baru dalam Cakrawalamedia.co.id, diakses 3 Maret 2019 Pukul 13.25 WIB).”

Dari pernyataan diatas, dapat digambarkan bahwa pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya perlu adanya evaluasi dalam hal kinerja kerja penyerapan dana anggaran termasuk anggaran belanja dalam program-program yang dilaksanakan dan begitupula terjadinya varians belanja dikarenakan dalam proses program-program ini berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja yang tidak mencapai target 100%. Seperti halnya di Kecamatan Cibereum, perlu dilakukan analisis dikarenakan anggaran belanja yang telah disusun pada tahun 2017 penyerapannya tidak mencapai 100%, yang artinya tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Maka terdapat permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cibereum ini. Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Predikat Nilai Capaian Kinerja Kecamatan Cibereum tahun 2017:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran 2017**

No Urut	Uraian	Anggaran 2017	Ralisasi 2017	(%)	Realisasi 2016
1.	Belanja	11,626,717,990,06	11,366,445,343,00	97.76	9,327,038,685,00
1.1	Belanja Operasi	10,688,768,555,06	10,504,743,343,00	98.28	9,187,583,285,00
1.1.1	Barang Pegawai	8,975,580,990,06	8,845,743,343,00	98.56	6,898,745,707,00
1.1.2	Barang barang	1,713,187,565,00	1,658,842,180,00	96.83	2,288,837,578,00
1.2	Belanja Modal	937,949,435,00	861,702,000,00	91.87	139,455,400,00
1.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	937,949,435,00	861,702,000,00	91.87	139,455,400,00
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	(11,626,717,990,06)	(11,366,445,343,00)	97.76	(9,327,038,685,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(11,626,717,990,06)	(11,366,445,343,00)	97.76	(9,327,038,685,00)

*Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Ciberuem*

**Tabel 1.2**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100%	Melebihi/melampaui
2	=100%	Sesuai Target
3	<100%	Tidak Mencapai Target

*Sumber : LKIP 2018 Kecamatan Cibeureum*

Berdasarkan hasil penelitian data di atas terjadinya varians belanja secara umum dikarenakan anggaran belanja pada Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 tidak tercapainya target realisasi anggran.

Menurut Cardisiawan (2009) sebagaimana dikutip oleh Jimmy Ventius (2016), kegagalan target penyerapan anggaran belanja ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja serta terjadinya varian belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran belanja efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. (repository.ipb.ac.id diakses pada 03 Januari 2019 pukul 16.05 WIB)

Pengukuran kinerja suatu instansi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan program, visi dan misi yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran di atas dan tabel predikat nilai capaian kerja, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pada kinerja keuangan Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasi pencapaian tidak sesuai target atau dibawah 100%. Anggaran belanja Kecamatan Cibeureum hanya mencapai 97,76%, artinya penyerapan anggaran belanja tidak mencapai target. Apabila terjadi kegagalan dalam mencapai target penyerapan anggaran belanja, maka belum optimalnya pengendalian anggaran belanja terhadap pos belanja dan sebab terjadinya varians belanja dikarenakan belum tercapainya target.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Varians Belanja Di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2017”** .

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah dan data awal yang disajikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian anggaran terhadap pos belanja di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

2. Penyerapan anggaran belanja tidak mencapai target.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu kepada hasil identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

- 1.4 Bagaimana Analisis Varian Belanja di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya pada tahun 2017
- 1.5 Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Pihak Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Tentang Varian Belanja
- 1.6 Bagaimana Upaya Pihak Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Menanggulangi Varian Belanja Pada Tahun 2017

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis varians belanja Sesuai dengan pertanyaan yang dirinci, dirumuskanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana analisis varians belanja di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan serta dalam penerapannya. Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan teori administrasi keuangan publik dan dapat menjadi

acuan bagi penelitian berikutnya mengenai anggaran belanja daerah maupun satuan kerja perangkat daerah.

b. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penulisan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam hal menulis, serta dapat mengembangkan wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai anggaran belanja daerah maupun satuan kerja perangkat daerah.

Bagi universitas, penulisan ini sebagai bahan pengembangan lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penulisan ini diharapkan mampu memperkaya ilmu-ilmu administrasi keuangan publik, khususnya keuangan daerah

Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan-keputusan mengenai keuangan daerah khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan.

## 1.6 Kerangka Teori

Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan varians belanja sebagai bentuk kinerja anggaran belanja di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Dalam bahasan Administrasi Publik, pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari pengelolaan keuangan daerah.



Kinerja keuangan atau kinerja anggaran belanja diartikan sebagai hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran belanja, bagaimana penyerapan anggaran belanja dari suatu perangkat daerah.

Dalam buku Abdul Halim (2012:31), anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan.

Mursyidi (2009:59) mengatakan bahwa untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya selama satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (Mursyidi, 2010: 64) adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tertentu. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode laporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Mahmudi (2016:154) Analisis varians belanja merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Varians dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians belanja sebagai berikut :

1. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih cukup beralasan dan dapat di pertanggungjawabkan
2. Berapa besarnya varians. Apa jumlahnya signifikan atau tidak?
3. Berapa tingkat selisih varians yang bisa ditoleransi?

Menurut Christian Kainde dalam Jurnal EMBA Vol. 1 (2013: 395), analisis belanja daerah sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengevaluasi apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien. Mahmudi (2010: 156) menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Analisis belanja menurut Mahmudi (2016: 154) antara lain berupa:

1. Analisis Pertumbuhan

Belanja Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Analisis Keceragaman Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi.

### 3. Rasio Efisiensi Belanja

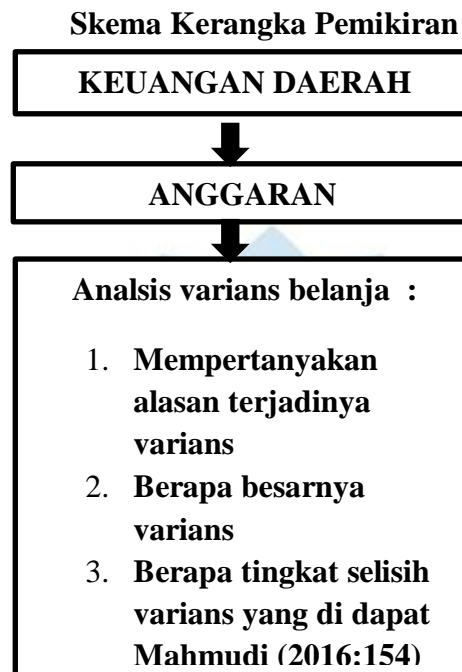
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dari pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga analisis diatas sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja anggaran belanja. dikarenakan untuk mengukur pertumbuhan belanja apa saja yang dibutuhkan untuk mengefektifkan anggaran, untuk menstabilkan anggaran dan rasio efisiensi untuk penghematan anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009: 181), aspek pelaksanaan efisiensi anggaran dapat dilihat dari:

1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah.
3. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuann

Gambar 1.1



### 1.7 Proposisi

Proposisi dari penelitian ini adalah analisis varians belanja di Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya. Dikarenkan tidak mencapai target dalam penyerapan anggaran belanja pada tahun 2017, serta belum optimalnya pengendalian anggaran terhadap pos belanja. Peneliti menggunakan analisis belanja daerah menurut Mahmudi (2016) yang mana hasil dari analisis ini digunakan untuk mengevaluasi penyerapan anggaran belanja suatu daerah dan aspek pelaksanaan efisiensi anggaran.